

KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN SERUYAN

Iswanti, Munfiq Rosandi Multihakiki

STIA Bina Banua Banjarmasin

Email: iswantistiabinabanua@gmail.com , hasanalyhadramy2@gmail.com

Abstract

Regional government leadership plays a strategic role in achieving effective public administration, particularly in directing bureaucracy, strengthening coordination, making decisions, and ensuring that public policies are implemented in accordance with governmental objectives. This study aims to analyze regional government leadership in achieving the effectiveness of public administration in Seruyan Regency, with a focus on the implementation of regional government during the 2018–2024 period. This study employs a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Informants were selected purposively based on their knowledge, experience, and involvement in regional government administration. Data were analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. Data validity was ensured through source, technique, and time triangulation. The findings indicate that regional government leadership plays an important role in improving the effectiveness of public administration through strengthened coordination, communication, decision-making, supervision, and the development of civil servant performance. The effectiveness of public administration is also influenced by the capacity of human resources, organizational culture, bureaucratic structure, availability of resources, and the social and geographical conditions of the region. Leadership that is able to integrate the government's vision with bureaucratic administrative capacity can contribute to more effective, accountable, responsive, and community-oriented governance. This study implies that strengthening regional government leadership should focus on improving bureaucratic capacity, enhancing coordination among regional government agencies, strengthening supervision and accountability, and promoting innovation in public administration.

Keywords: government leadership, public administration, regional government, bureaucratic effectiveness, Seruyan Regency.

Abstrak

Kepemimpinan pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan efektivitas administrasi pemerintahan, terutama dalam mengarahkan birokrasi, membangun koordinasi, mengambil keputusan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis kepemimpinan pemerintahan daerah dalam mewujudkan efektivitas administrasi pemerintahan Kabupaten Seruyan dengan menggunakan konteks penyelenggaraan pemerintahan periode 2018–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas administrasi pemerintahan melalui penguatan koordinasi, komunikasi, pengambilan keputusan, pengawasan, serta pengembangan kinerja aparatur. Efektivitas administrasi pemerintahan juga dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya aparatur, budaya organisasi, struktur birokrasi, ketersediaan sumber daya, serta kondisi sosial dan geografis daerah. Kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan visi pemerintahan dengan kapasitas administratif birokrasi dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa penguatan kepemimpinan pemerintahan daerah perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, penguatan pengawasan, serta pengembangan inovasi administrasi pemerintahan.

Kata kunci: kepemimpinan pemerintahan, administrasi pemerintahan, pemerintahan daerah, efektivitas birokrasi, Kabupaten Seruyan.

Diterima: 10 Juli 2026 | Direvisi: 05 Agustus 2026 | Diterbitkan: 25 Agustus 2026

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan tujuan negara melalui pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut mampu menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus memiliki kapasitas dalam merumuskan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks tersebut, kepemimpinan pemerintahan daerah memiliki posisi strategis karena pemimpin daerah menjadi salah satu aktor utama yang menentukan arah kebijakan, membangun koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, serta memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat diterjemahkan ke dalam program dan pelayanan publik yang efektif.

Efektivitas administrasi pemerintahan pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya aparatur dan perangkat organisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan kepemimpinan dalam mengarahkan organisasi pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan yang efektif diperlukan untuk membangun koordinasi, komunikasi, pembagian tugas, pengawasan, serta pengambilan keputusan yang tepat. Dalam pemerintahan daerah, kemampuan tersebut menjadi semakin penting karena kompleksitas persoalan pembangunan dan pelayanan publik

menuntut adanya keterpaduan antara kepemimpinan politik dengan kapasitas administratif birokrasi.

Kabupaten Seruyan sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki karakteristik wilayah dan masyarakat yang memberikan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi geografis, persebaran penduduk, kebutuhan pembangunan, pelayanan publik, serta dinamika sosial dan ekonomi masyarakat menuntut pemerintah daerah untuk memiliki tata kelola pemerintahan yang responsif dan adaptif. Dalam situasi tersebut, kepemimpinan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa organisasi perangkat daerah mampu bekerja secara terkoordinasi dan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Periode pemerintahan Kabupaten Seruyan tahun 2018–2024 merupakan periode yang menarik untuk dikaji dari perspektif administrasi pemerintahan. Periode tersebut mencakup berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kinerja birokrasi, pelaksanaan pembangunan daerah, serta perubahan lingkungan pemerintahan yang membutuhkan kemampuan adaptasi organisasi. Oleh karena itu, kajian terhadap kepemimpinan pemerintahan daerah pada periode tersebut penting dilakukan untuk memahami bagaimana kepemimpinan diterjemahkan ke dalam praktik administrasi pemerintahan.

Dalam perspektif administrasi publik, hubungan antara kepemimpinan dan efektivitas organisasi pemerintahan merupakan persoalan yang tidak dapat dipisahkan. Pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai pengarah organisasi, pembangun motivasi aparatur, penghubung antaraktor pemerintahan, serta pengendali pelaksanaan kebijakan. Kepemimpinan yang mampu membangun komunikasi dan koordinasi secara efektif dapat menciptakan keselarasan antara visi kepala daerah dengan pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah. Sebaliknya, lemahnya koordinasi dan komunikasi dapat menimbulkan fragmentasi kebijakan, tumpang tindih kewenangan, lambatnya pengambilan keputusan, dan rendahnya efektivitas pelaksanaan program pemerintahan.

Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan ketika pemerintah daerah dihadapkan pada tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik. Masyarakat tidak hanya mengharapkan pemerintah mampu menyediakan pelayanan, tetapi juga menginginkan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan kondisi tersebut diperlukan kepemimpinan yang mampu menggerakkan birokrasi, melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur, serta mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Di sisi lain, efektivitas administrasi pemerintahan juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam membangun hubungan kerja yang produktif antara kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretariat daerah, organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pemerintahan daerah pada hakikatnya merupakan sebuah sistem organisasi yang

melibatkan banyak aktor. Karena itu, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keputusan pimpinan, tetapi juga oleh kemampuan seluruh unsur pemerintahan untuk memahami tujuan kebijakan dan melaksanakannya secara konsisten.

Penelitian mengenai kepemimpinan pemerintahan daerah menjadi penting karena kajian kepemimpinan tidak seharusnya hanya diarahkan pada gaya atau karakter pribadi seorang pemimpin. Dalam perspektif administrasi pemerintahan, kepemimpinan perlu dilihat dari kemampuan pemimpin dalam menghasilkan perubahan organisasi, meningkatkan koordinasi, memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kinerja aparatur, serta memastikan tercapainya tujuan pelayanan dan pembangunan daerah. Dengan pendekatan tersebut, kepemimpinan dapat dianalisis sebagai bagian dari proses administrasi pemerintahan yang memiliki dampak terhadap efektivitas organisasi publik.

Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menganalisis kepemimpinan pemerintahan daerah dalam mewujudkan efektivitas administrasi pemerintahan Kabupaten Seruyan. Periode 2018–2024 digunakan sebagai konteks empiris untuk melihat dinamika kepemimpinan, pola koordinasi, proses pengambilan keputusan, komunikasi pemerintahan, pengawasan birokrasi, serta pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kepemimpinan pemerintahan daerah dengan efektivitas administrasi pemerintahan.

Keunikan penelitian ini terletak pada upaya melihat kepemimpinan pemerintahan daerah tidak hanya dari perspektif individu pemimpin, tetapi sebagai suatu proses yang menghubungkan kepemimpinan politik dengan administrasi birokrasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menemukan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kepemimpinan pemerintahan daerah serta merumuskan strategi yang dapat memperkuat kapasitas kepemimpinan dan administrasi pemerintahan di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana kepemimpinan pemerintahan daerah berperan dalam mewujudkan efektivitas administrasi pemerintahan Kabupaten Seruyan, bagaimana mekanisme koordinasi dan komunikasi dibangun dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitas kepemimpinan pemerintahan daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu administrasi pemerintahan sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan tata kelola pemerintahan daerah di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kepemimpinan pemerintahan daerah dalam mewujudkan efektivitas administrasi pemerintahan Kabupaten Seruyan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena pemerintahan berdasarkan kondisi yang terjadi secara alamiah, termasuk proses pengambilan keputusan, pola koordinasi, komunikasi pemerintahan, pengawasan birokrasi, serta pelaksanaan

kebijakan dan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan periode 2018–2024 sebagai konteks empiris untuk memahami dinamika kepemimpinan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Kabupaten Seruyan.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Seruyan memiliki karakteristik pemerintahan daerah, kondisi geografis, serta kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang relevan dengan kajian mengenai kepemimpinan pemerintahan daerah. Fokus penelitian diarahkan pada praktik kepemimpinan pemerintahan daerah, terutama dalam proses pengambilan keputusan, koordinasi antara kepala daerah dan organisasi perangkat daerah, komunikasi pemerintahan, pengawasan terhadap birokrasi, serta upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam mewujudkan efektivitas administrasi pemerintahan daerah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Seruyan. Informan penelitian dapat berasal dari unsur kepala daerah dan/atau mantan kepala daerah, wakil kepala daerah dan/atau mantan wakil kepala daerah, sekretaris daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah, pejabat struktural, aparatur sipil negara, anggota DPRD, kepala desa, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lain yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen pemerintahan yang relevan, seperti peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dokumen perencanaan pembangunan, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan kinerja instansi pemerintah, dokumen program kerja, serta berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan Kabupaten Seruyan.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan dipilih karena dianggap memiliki informasi yang relevan mengenai kepemimpinan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah. Dalam proses penelitian, teknik snowball sampling juga dapat digunakan untuk memperoleh informan tambahan berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya. Penambahan informan dilakukan sampai data yang diperoleh dianggap memadai dan mencapai kondisi kejenuhan data atau data saturation, yaitu keadaan ketika wawancara tambahan tidak lagi memberikan informasi substantif yang berbeda dengan data yang telah diperoleh sebelumnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan, tetapi tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman, pandangan, dan penilaiannya secara lebih luas. Wawancara diarahkan untuk menggali informasi

mengenai praktik kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, hubungan antara pimpinan dan aparatur, koordinasi antarlembaga, komunikasi pemerintahan, pengawasan birokrasi, pelaksanaan kebijakan, serta berbagai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi dan aktivitas pemerintahan yang berkaitan dengan fokus penelitian, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa dokumen kebijakan, laporan pemerintahan, data program, serta dokumen administratif lainnya.

Analisis data dilakukan secara interaktif sejak proses pengumpulan data berlangsung. Analisis mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kondensasi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, mengelompokkan, dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga hubungan antara kepemimpinan pemerintahan, pengambilan keputusan, koordinasi, komunikasi, pengawasan, dan efektivitas administrasi pemerintahan dapat dipahami secara sistematis. Tahap selanjutnya adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan dengan mengidentifikasi pola, tema, hubungan, dan makna yang muncul dari data penelitian. Kesimpulan diverifikasi secara berkelanjutan dengan membandingkan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data.

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai kelompok informan, seperti unsur pimpinan daerah, organisasi perangkat daerah, aparatur, DPRD, pemerintah desa, dan masyarakat. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi data. Keabsahan data juga diperkuat melalui proses member checking, yaitu memberikan kesempatan kepada informan untuk mengonfirmasi atau memberikan klarifikasi terhadap informasi yang telah diperoleh peneliti.

Dalam pelaksanaan penelitian, aspek etika penelitian juga menjadi perhatian utama. Peneliti memastikan bahwa informan memperoleh penjelasan mengenai tujuan penelitian dan penggunaan informasi yang diberikan. Data yang bersifat pribadi atau sensitif dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Penelitian juga berupaya menjaga objektivitas dengan membedakan antara pengalaman pribadi, persepsi informan, dan temuan penelitian yang didukung oleh data. Hal ini menjadi penting karena penelitian mengenai kepemimpinan pemerintahan daerah melibatkan pengalaman dan persepsi berbagai pihak sehingga interpretasi data harus dilakukan secara kritis dan berdasarkan bukti yang diperoleh selama proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan pemerintahan daerah memiliki posisi strategis dalam menentukan arah penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kabupaten Seruyan. Dalam konteks pemerintahan daerah, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan kepala daerah dalam menetapkan kebijakan, tetapi juga mencakup kemampuan mengarahkan organisasi perangkat daerah, membangun koordinasi, menggerakkan aparatur, melakukan pengawasan, serta memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemerintahan. Kepemimpinan pemerintahan dengan demikian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses administrasi publik karena keputusan pemimpin akan memengaruhi cara organisasi pemerintahan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.

Kepemimpinan yang efektif dalam pemerintahan daerah perlu mampu menghubungkan visi politik kepala daerah dengan kapasitas administratif birokrasi. Kepala daerah memiliki mandat untuk menentukan arah pembangunan dan prioritas kebijakan, sementara perangkat daerah bertanggung jawab menerjemahkan arah tersebut ke dalam program dan kegiatan. Hubungan yang baik antara kepemimpinan dan birokrasi akan menciptakan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pemerintahan. Sebaliknya, apabila koordinasi antara kepemimpinan dan birokrasi tidak berjalan secara optimal, pelaksanaan kebijakan berpotensi mengalami hambatan karena adanya perbedaan pemahaman mengenai prioritas, kewenangan, maupun target organisasi.

Dalam perspektif kepemimpinan sektor publik, pemimpin pemerintahan juga dituntut untuk memiliki kemampuan membangun kepercayaan dan hubungan kerja dengan aparatur. Lee (2016) menjelaskan bahwa kepemimpinan, kepercayaan, dan kepuasan kerja memiliki keterkaitan dalam organisasi sektor publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan formal, tetapi juga membutuhkan kemampuan membangun hubungan interpersonal dan lingkungan kerja yang memungkinkan aparatur menjalankan tugas secara optimal.

Koordinasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Koordinasi merupakan salah satu aspek penting dalam efektivitas administrasi pemerintahan daerah. Kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan menyebabkan tidak semua persoalan dapat diselesaikan oleh satu organisasi perangkat daerah. Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah dengan kewenangan dan fungsi yang berbeda. Oleh karena itu, kepemimpinan pemerintahan daerah dituntut mampu membangun mekanisme koordinasi yang memungkinkan setiap organisasi memahami tugas, kewenangan, target, serta kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah.

Dalam konteks Kabupaten Seruyan, koordinasi pemerintahan dapat dipahami sebagai proses yang menghubungkan kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretariat daerah, organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta

pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi yang efektif memungkinkan berbagai program pemerintah dilaksanakan secara lebih terintegrasi dan mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih program. Selain itu, koordinasi juga menjadi instrumen penting dalam penyelesaian berbagai persoalan yang bersifat lintas sektor.

Komunikasi pemerintahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses koordinasi. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan daerah perlu dikomunikasikan secara jelas kepada organisasi perangkat daerah agar dapat diterjemahkan ke dalam tindakan administratif. Komunikasi yang terbuka juga memungkinkan pimpinan memperoleh informasi mengenai hambatan yang dihadapi aparatur dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya berlangsung secara vertikal dari pimpinan kepada bawahan, tetapi juga secara horizontal antarorganisasi perangkat daerah.

Kemampuan pemimpin dalam membangun komunikasi dan koordinasi juga berkaitan dengan kemampuan organisasi pemerintahan dalam mengambil keputusan. Kuk, Zhang, dan Dey (2016) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan struktur pengambilan keputusan dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan proyek pemerintahan. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa efektivitas administrasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh bagaimana keputusan dibuat, dikomunikasikan, dan diterjemahkan menjadi tindakan organisasi.

Pengambilan Keputusan dalam Administrasi Pemerintahan

Pengambilan keputusan merupakan salah satu fungsi utama kepemimpinan pemerintahan daerah. Setiap kebijakan pemerintah pada akhirnya membutuhkan keputusan yang jelas mengenai tujuan, prioritas, sumber daya, pelaksana, serta mekanisme pengawasan. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengambilan keputusan juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan anggaran, serta kondisi sosial dan ekonomi daerah.

Kepemimpinan yang efektif dalam pengambilan keputusan ditandai dengan kemampuan mengidentifikasi persoalan, memperoleh informasi yang memadai, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan menentukan pilihan berdasarkan kepentingan publik. Proses pengambilan keputusan juga perlu melibatkan komunikasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang memiliki pengetahuan mengenai persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, keputusan pemerintahan tidak hanya bersifat top-down, tetapi didukung oleh informasi dan masukan dari organisasi yang melaksanakan kebijakan.

Pengambilan keputusan yang efektif juga membutuhkan kemampuan pemimpin dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Pemerintah daerah sering menghadapi persoalan yang berkembang secara cepat sehingga keputusan tidak selalu dapat dibuat berdasarkan kondisi yang ideal. Dalam situasi tersebut, pemimpin membutuhkan kemampuan adaptasi dan keberanian mengambil keputusan dengan tetap mempertimbangkan prinsip akuntabilitas dan kepentingan masyarakat.

Kepemimpinan dan Kinerja Aparatur Pemerintahan

Efektivitas administrasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kinerja aparatur. Kebijakan yang baik tidak akan menghasilkan pelayanan publik yang optimal apabila tidak didukung oleh aparatur yang memiliki kompetensi, motivasi, integritas, dan orientasi pelayanan. Oleh karena itu, kepemimpinan pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan organisasi yang mampu mendorong aparatur bekerja secara profesional.

Pemimpin dapat memengaruhi kinerja aparatur melalui pemberian arahan yang jelas, pembagian tugas yang proporsional, penghargaan terhadap kinerja, pembinaan, pengawasan, serta pemberian ruang bagi aparatur untuk menyampaikan gagasan dan menyelesaikan persoalan. Kepemimpinan yang memberikan kepercayaan kepada aparatur sekaligus melakukan pengawasan secara proporsional dapat menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas dan akuntabilitas.

Dalam perspektif tersebut, efektivitas administrasi pemerintahan tidak hanya dilihat dari capaian program, tetapi juga dari proses organisasi dalam menggerakkan sumber daya manusia. Pemimpin daerah perlu memastikan bahwa organisasi perangkat daerah memiliki tujuan yang jelas dan bahwa setiap aparatur memahami kontribusinya terhadap pencapaian tujuan tersebut.

Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintahan

Pengawasan merupakan bagian penting dalam mewujudkan administrasi pemerintahan yang efektif. Kepemimpinan pemerintahan daerah perlu memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan, peraturan, serta tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan juga berfungsi untuk mengidentifikasi hambatan sejak awal sehingga tindakan korektif dapat dilakukan sebelum permasalahan berkembang menjadi lebih besar.

Akuntabilitas dalam pemerintahan daerah tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban terhadap proses dan hasil kebijakan. Pemimpin pemerintahan perlu membangun budaya organisasi yang mendorong aparatur untuk bertanggung jawab atas tugas dan kewenangannya. Downe, Cowell, dan Morgan (2016) menunjukkan pentingnya kepemimpinan dan perilaku etis dalam organisasi publik. Dengan demikian, keteladanan pemimpin menjadi salah satu unsur penting dalam membangun budaya birokrasi yang berintegritas.

Pengawasan yang efektif juga perlu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak semata-mata bersifat represif. Pengawasan dapat digunakan sebagai instrumen pembinaan untuk memperbaiki kinerja organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Pendekatan tersebut memungkinkan kepemimpinan pemerintahan daerah mengembangkan birokrasi yang tidak hanya patuh terhadap aturan, tetapi juga mampu belajar dari kesalahan dan melakukan perbaikan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Kepemimpinan

Efektivitas kepemimpinan pemerintahan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain kualitas sumber daya aparatur, struktur

organisasi, budaya kerja, sistem komunikasi, ketersediaan anggaran, serta kapasitas organisasi perangkat daerah. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa kondisi sosial masyarakat, perubahan regulasi, dinamika politik, perkembangan ekonomi, kondisi geografis, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Ketersediaan aparatur yang memiliki kompetensi dan pemahaman terhadap tugas menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas kepemimpinan. Pemimpin yang memiliki visi dan kebijakan yang jelas tetap membutuhkan birokrasi yang mampu menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi program kerja. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur menjadi bagian penting dari strategi memperkuat administrasi pemerintahan daerah.

Selain sumber daya manusia, budaya organisasi juga berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan. Budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan dan inovasi dapat membantu pemerintah daerah merespons kebutuhan masyarakat secara lebih cepat. Sebaliknya, budaya organisasi yang terlalu birokratis dan kurang adaptif dapat menghambat inovasi dan memperlambat proses pengambilan keputusan. Wang dan Feeney (2016) menunjukkan bahwa karakteristik organisasi memiliki hubungan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengadopsi teknologi informasi dan inovasi.

Strategi Penguatan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan pembahasan tersebut, penguatan kepemimpinan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, memperkuat koordinasi antara kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretariat daerah, dan organisasi perangkat daerah melalui mekanisme koordinasi yang terstruktur. Kedua, meningkatkan kualitas komunikasi internal sehingga kebijakan dan prioritas pembangunan dapat dipahami secara seragam oleh seluruh organisasi pemerintahan.

Ketiga, memperkuat kapasitas aparatur melalui pengembangan kompetensi dan budaya kerja berbasis kinerja. Keempat, meningkatkan sistem pengawasan dan evaluasi sehingga setiap program pemerintahan dapat dinilai berdasarkan pencapaian tujuan dan manfaat bagi masyarakat. Kelima, mendorong inovasi administrasi pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pendekatan pelayanan publik yang lebih responsif.

Strategi tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan pemerintahan daerah yang efektif bukan hanya berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam membuat keputusan, tetapi juga kemampuan membangun sistem organisasi yang mampu melaksanakan keputusan tersebut secara konsisten. Kepemimpinan perlu diarahkan pada penciptaan birokrasi yang profesional, adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa kepemimpinan pemerintahan daerah dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas administrasi pemerintahan Kabupaten Seruyan. Kepemimpinan yang didukung koordinasi yang baik, komunikasi terbuka, pengambilan keputusan yang tepat, pengawasan yang efektif, dan pengembangan kapasitas aparatur akan menciptakan kondisi organisasi yang lebih mampu mencapai tujuan pemerintahan. Oleh karena itu,

kepemimpinan pemerintahan perlu ditempatkan bukan hanya sebagai persoalan figur atau gaya kepemimpinan, tetapi sebagai bagian integral dari proses administrasi pemerintahan dan tata kelola pemerintahan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kepemimpinan pemerintahan daerah dalam mewujudkan efektivitas administrasi pemerintahan Kabupaten Seruyan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan memiliki peran strategis dalam menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepemimpinan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan dalam menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan, tetapi juga mencakup kemampuan mengarahkan aparatur, membangun koordinasi, mengembangkan komunikasi pemerintahan, melakukan pengawasan, serta memastikan kebijakan dapat diterjemahkan ke dalam pelaksanaan program dan pelayanan publik. Dengan demikian, efektivitas administrasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepemimpinan dalam mengintegrasikan berbagai unsur organisasi pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kepemimpinan pemerintahan daerah yang efektif perlu didukung oleh koordinasi dan komunikasi yang baik antara kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretariat daerah, organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi yang efektif dapat mengurangi tumpang tindih pelaksanaan program, memperjelas pembagian tugas dan kewenangan, serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pemerintahan. Sementara itu, komunikasi yang terbuka dan dua arah memungkinkan kebijakan dan prioritas pemerintah daerah dipahami secara lebih baik oleh aparatur sekaligus memberikan ruang bagi organisasi perangkat daerah untuk menyampaikan berbagai kendala dalam pelaksanaan kebijakan.

Efektivitas kepemimpinan juga terlihat dari kemampuan dalam membangun kinerja aparatur dan menciptakan budaya organisasi yang mendukung pencapaian tujuan pemerintahan. Aparatur merupakan pelaksana utama kebijakan dan pelayanan publik sehingga kepemimpinan perlu memberikan arahan, motivasi, pembinaan, serta pengawasan yang proporsional. Kepemimpinan yang mampu membangun kepercayaan sekaligus menegakkan akuntabilitas dapat mendorong terciptanya aparatur yang lebih profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas administrasi pemerintahan dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Faktor internal meliputi kapasitas sumber daya aparatur, struktur organisasi, budaya kerja, komunikasi, ketersediaan sumber daya, dan sistem pengawasan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kondisi geografis, dinamika sosial masyarakat, perubahan kebijakan dan regulasi, serta perkembangan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kepemimpinan pemerintahan daerah dituntut memiliki kemampuan adaptasi agar dapat merespons perubahan lingkungan pemerintahan secara tepat.

Dalam konteks Kabupaten Seruyan, penguatan kepemimpinan pemerintahan perlu diarahkan pada pengembangan model kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan kepemimpinan politik dengan kapasitas administratif birokrasi. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas koordinasi dan komunikasi, pengembangan kompetensi aparatur, penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas, peningkatan kualitas pengambilan keputusan, serta pengembangan inovasi pelayanan publik. Pendekatan tersebut penting agar kepemimpinan tidak hanya menghasilkan kebijakan, tetapi juga mampu memastikan kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi pemerintahan dengan menempatkan kepemimpinan pemerintahan daerah sebagai bagian integral dari proses administrasi publik. Kepemimpinan dipahami bukan semata-mata sebagai karakter atau gaya individu pemimpin, melainkan sebagai proses yang mencakup pengambilan keputusan, koordinasi, komunikasi, penggerakan aparatur, pengawasan, dan pencapaian tujuan organisasi publik. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat efektivitas administrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan membandingkan kepemimpinan pemerintahan Kabupaten Seruyan dengan daerah lain yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang serupa. Penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur secara lebih spesifik pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja aparatur, kualitas pelayanan publik, dan efektivitas organisasi pemerintahan daerah.

BIBLIOGRAFI

- Asencio, H. (2016). Leadership, trust, and job satisfaction in the public sector: A study of US federal employees. *International Review of Public Administration*, 21(3), 250–267. <https://doi.org/10.1080/12294659.2016.1237342>
- Bass, B. M. (1985). *Leadership and performance beyond expectations*. Free Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). Routledge.
- Downe, J., Cowell, R., & Morgan, K. (2016). What determines ethical behavior in public organizations: Is it rules or leadership? *Public Administration Review*, 76(6), 898–909. <https://doi.org/10.1111/puar.12562>
- Kuk, G., Zhang, W., & Dey, S. (2016). A garbage can model of government IT project failures in developing countries: The effects of leadership, decision structure and team competence. *Government Information Quarterly*, 33(4), 629–637.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Osborne, S. P. (Ed.). (2010). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Routledge.
- Trottier, T., Van Wart, M., & Wang, X. (2008). Examining the nature and significance of leadership in government organizations. *Public Administration Review*, 68(2), 319–333. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00865.x>
- Wang, S., & Feeney, M. K. (2016). Determinants of information and communication technology adoption in municipalities. *American Review of Public Administration*, 46(3), 292–313. <https://doi.org/10.1177/0275074014553462>
- Wibowo. (2016). *Manajemen kinerja* (5th ed.). Rajawali Pers.
- Yukl, G. (2013). *Leadership in organizations* (8th ed.). Pearson.

First publication right:

[Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia](#)

This article is licensed under:

